

DAFTAR PUSTAKA

Primer

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT. Alumni, 2000.
- ACILS-IMC-USAID. *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*. Lembaga Advokasi Hak Anak: Bandung, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Rafindo: 2000.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1986.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Asnifriyanti, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita: Metode Penyelesaian Kasus Berperspektif Wanita*, Bandung: ALUMNI, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dikdik Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: .PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- E. N. Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.
- , *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2014.

-----, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Usul Inisiatif Masyarakat*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2008.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2010.

Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking* Jakarta: Universitas Indonesia, Human Right Center, 2003.

Indah S. Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.

Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta: Penerbit BPFE-UGM, 2002.

Munir Fuady, *Bisnis Kotor; Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Penerbit Reneka Cipta, 1998.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Wagiman, Wahyu dan Zainal Abidin. *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.

-----, *et.al.* Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi, serta Bantuan bagi Saksi dan Korban: Usul Inisiatif Masyarakat, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.

Yazid Effendi, *Pengantar Victimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Purwokerto: Penerbit Universitas Jenderal Soedirman, 2001.

Yusuf Irianto *Tema-Tema Pokok Manajemen Sumber Daya Alam*, Surabaya: Penerbit Insan Cendekiawan, 2001.

Zohra Andi Baso, et al., *Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002.

Sekunder

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOMOR 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 67 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 64 Tahun 2006.

Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 21 Tahun 2007. LN No. 58 Tahun 2007. TLN No. 4720.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. LN No. 293 Tahun 2014. TLN No. 5602.

Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. PP No. 44 Tahun 2008. LN No. 84 Tahun 2008. TLN No. 4860.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi.

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

